

# PERANAN ELIT TRADISIONAL DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN WAKATOBI 2014<sup>1</sup>

Oleh : Amrianto<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Sejak masa bergulirnya sistem pemilu langsung, khususnya pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang: para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus bekerjasama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun berbicara mengenai dinamika politik lokal, sejak dulu Wakatobi telah dikuasai oleh aktor-aktor politik tradisional yang berbasis golongan elit tradisional. *Kaboru-mboru talupalena (kumbewaha, tapi-tapi, tanailandu)* menjadi tiga kelompok besar dalam memainkan politik lokal yang ada di kabupaten Wakatobi, dan sekaligus tiga kelompok inilah yang membuatnya jatuh, karena dinamika politik yang begitu kuat diantara elit itu, yang menyebabkan Wakatobi tidak dapat memilih dan melantik sultannya dalam waktu yang cukup lama. Di samping itu, Wakatobi juga mengalami dinamika politik yang sengaja dimainkan oleh pemerintah pusat di Buton, dimana pembagian kekuasaan menjadi dasar bagi terbangunnya dinamika politik yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang peranan elit tradisional (Suzanne Keller). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi, adanya hubungan ketergantungan antara masyarakat (massa) dengan bangsawan Wakatobi. Dengan modal ekonomi tersebut mampu menimbulkan hubungan sangat permanen antara keduanya, yang mana dengan kebangsawan tersebut orientasi politik tidak akan berpaling kepada siapapun. Dalam bidang politik, pilihan politik bangsawan Wakatobi di tempatkan sebagai tokoh, dimana keputusan politik akan selalu di patuhi dan tidak berani dilanggar. Di bidang sosial, posisi sosial (kedudukan) akan berpengaruh kepada masyarakat, dimana dengan struktur itu masyarakat akan merasa aman dalam lingkungan bermasyarakat dan bangsawan Wakatobi akan memelihara adat dan nilai tersebut. Dalam bidang psikologis, adanya hubungan emosional antara bangsawan Wakatobi dengan masyarakat dan mengarah kepada kesetiaan pada bangsawan Wakatobi yang tentunya tidak didasarkan pada rasionalitas. Hubungan bangsawan Wakatobi dengan masyarakat masih sangat kental sekali sifatnya kekeluargaan.

***Kata Kunci : Peranan Elit Tradisional, Dinamika Politik, Pilkada***

## PENDAHULUAN

Sejak masa bergulirnya sistem pemilu langsung, khususnya pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang: para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus bekerjasama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, persaingan antarelit politik lokal dapat dimaknai sebagai

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

situasi yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Perbedaan itu bisa bersifat ideologis atau kebijakan, khususnya kebijakan yang hanya menguntungkan seseorang atau sekelompok orang saja (Kuskridho Ambardi, 2009: 19). Kebijakan seperti ini merupakan konsekuensi perburuan rente yang dilakukan politisi. Para politisi melihat jabatan-jabatan di eksekutif dan parlemen kerap diprioritaskan sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan politik yang bersifat substantif yakni perjuangan akan kebenaran dan keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Perburuan rente merupakan fenomena yang sering kita temukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, atau kajian pelaku bisnis untuk mendapatkan kemudahan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (dengan atas nama publik), dengan memberikan hak-hak tertentu kepada satu, atau sekelompok orang pelaku bisnis dari lisensi atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan mendapatkan berbagai keistimewaan dalam usaha bisnisnya.

Pemilukada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elit vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pemilukada terkadang terjadi konflik yang sepiertinya sulit terhindarkan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada aras lokal. Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Pada masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya. Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.

Sehubungan dengan itu, Wakatobi yang merupakan wilayah eks-Kesultanan Buton memiliki dinamika politik lokal yang sangat kompleks. Karena sejak lama, kultur politik Wakatobi telah terbentuk sejak di zaman Kesultanan Buton. Dalam hubungannya dengan dinamika politik lokal Wakatobi pada umumnya telah memiliki sistem demokratis dalam rangka pemilihan sultannya. Dimana pada masa lalu Kesultanan Buton telah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin besar di Nusantara dan bahkan dalam dunia Islam, misalnya Muhamad Idrus Kaimuddin dimana kepemimpinan beliau membawa Buton kepada masa keemasan.

Namun berbicara mengenai dinamika politik lokal, sejak dulu Wakatobi telah dikuasai oleh aktor-aktor politik tradisional yang berbasis golongan elit tradisional. *Kaboru-mporu talupalena* (kumbewaha, tapi-tapi, tanailandu) menjadi tiga kelompok besar dalam memainkan politik lokal yang ada di kabupaten Wakatobi, dan sekaligus tiga kelompok inilah yang membuatnya jatuh, karena dinamika politik yang begitu kuat diantara elit itu, yang menyebabkan Wakatobi tidak dapat memilih dan melantik sultannya dalam waktu yang cukup lama. Di samping itu, Wakatobi juga mengalami dinamika politik yang sengaja dimainkan oleh pemerintah pusat di Buton, dimana pembagian kekuasaan menjadi dasar bagi terbangunnya dinamika politik yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan.

Disisi lain, bagi elit tradisional di kabupaten Wakatobi, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik. Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di kabupaten Wakatobi, elit tradisional masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengelaborasi tentang **“Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014”**.

### **Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian di atas, maka penelitian ini akan fokus pada masalah “Dinamika politik (elit tradisional) dalam pemilihan kepala daerah secara langsung”. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Wakatobi tahun 2014 ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran secara deskriptif tentang dinamika politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014.
2. Untuk mengetahui peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas diskursus sosial dan politik pada aras lokal, dan diharapkan temuan-temuan konseptual hasil kajian lebih memperkuat dan memperkaya pengetahuan-pengetahuan dimaksud dengan karakter epistime lokalitas.

##### **2. Secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara praktis dengan baik pada masyarakat di kabupaten Wakatobi dan penelitian ini diharapkan pula bisa menyumbangkan *academic values* bagi kepentingan praksis sosial dan politik di kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) dan pemerintahan pada umumnya. Setidaknya, hasil penelitian bisa digunakan sebagai referensi ilmiah bagi para elit lokal guna kepentingan aktivitas politik yang dilakukannya baik untuk kepentingan saat sekarang maupun di masa mendatang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Peranan**

Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Peranan berasal dari kata *peran*, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

"Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan di pegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu pula. Harapan ataupun dugaan itulah yang membentuk peranan" (Mas'ood, 1989: 45).

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. (Soerjono Soekanto, 1990: 268).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## **B. Elit Tradisional**

Untuk menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan pemikiran *Suzanne Keller* tentang peranan elit tradisional. Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller 1995:28). Jika mengacu pada elite lokal adalah individu yang memegang peran penting dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal. Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elite yaitu:

1. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.
2. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya.

Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk pemimpin agama, golongan elit tradisional, tuan tanah dan orang-orang dari kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial. Seorang anggota elite dapat menganggotai beberapa kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja mungkin juga seorang pemimpin agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah yang mempunyai beberapa kepentingan tertentu.

Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang disebut elit (Keller, 1995:31). Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan politik suatu wilayah berada pada elit politik. Berikut adalah beberapa pengertian tentang elite:

- a. Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik, elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.

- b. Elit politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga negara. Dalam sistem politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa.
- c. Elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat, dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keller mengungkapkan bahwa elit yang berpengaruh dalam kondisi masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogonitas disebut elit strategis. Dalam kondisi modern, elit strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, elit tradisional dianggap sebagai elit strategis sebagai orang yang memiliki kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya.

Dari beberapa pemikiran di atas memberikan sebuah gambaran bahwa peranan elit dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan. Sebagai tokoh yang berpengaruh, elit dapat mendorong massa menuju kepada arah untuk mewujudkan kepentingannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia, tentu saja membawa dinamika yang mempengaruhi munculnya elit-elit baru yang lebih kompleks. Bahkan, mengurangi peranan dari elit-elit lama, seperti peranan elit keturunan kerajaan.

### **C. Dinamika Politik Lokal**

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, pergerakan, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Soelaiman Joesoyf memberikan batasan bahwa: "Perubahan secara besar maupun secara kecil atau perubahan secara cepat atau lambat itu sesungguhnya adalah suatu dinamika, artinya suatu kenyataan yang berhubungan dengan perubahan keadaan". Soelaiman Joesoyf (1986; 12).

Sebelum masuk dalam kajian konsep tentang dinamika politik lokal maka kita harus memahami tentang pemilukada secara langsung. Pemilukada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di negeri ini, karena pemilukada langsung merupakan momentum pelekatan dasar kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Pemilukada yang akan dilaksanakan di daerah pun diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berpolitikan di tingkat lokal, membawa nilai-nilai identitas lokal baik secara sosio-ekonomi, politik, serta budaya masyarakat.

Tidak heran modal sosial yang ada dalam masyarakat lokal digunakan oleh politisi, elit lokal dalam memenuhi kepentingan pemilihan kepala daerah. secara logika maka modal sosial seperti, munculnya identitas, suku, agama, ras, budaya, dll, yang tentunya merupakan elemen-elemen politik yang tidak bisa dihindari harus bersentuhan dengan persoalan politik. Politik identitas muncul akibat bagian dari elemen politik sebagai modal sosial dalam masyarakat lokal. Tetapi yang menjadi titik fokus ketika politik identitas turut dilibatkan proses pemilihan kepala daerah oleh elit lokal dijadikan tameng politik dengan muatan yang tidak logis, tetapi rasional bagi elit yang mempunyai kepentingan, memperjuangkan apa yang diinginkan. Tidak heran elit-elit lokal seperti tokoh adat, kepala suku, agama, dijadikan sebagai tameng demi memuluskan kepentingan dalam Pemilukada (Nurhasim, 2003; 15-17).

Tidak jarang sesudah dan sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung sering terjadi konflik, yang dimainkan oleh elit lokal yang terkadang tidak menerima kekalahan, atau mencari keadilan dalam proses pemilu setelah berlangsung (Nurhasim, 2003; 19).

Banyak konflik yang berskala besar sampai kecil sering terjadi pasca pemilu. Banyak warga masyarakat yang dirugikan, daerah tidak aman, membuat kualitas demokrasi terus dipertanyakan di negeri ini. Para elit/calon kepala daerah, partai memainkan manajemen

konflik yang tidak mendidik, membuat rakyat menderita. Sebenarnya elit lokal menghargai norma, nilai yang berada dalam masyarakat lokal. Rakyat kadang dibodohi oleh elit hitam, hanya untuk mengejar kepentingan mereka. Masyarakat lokal, harus pandai, kepala suku, tokoh agama, budaya, harus dibekali dengan pendidikan politik yang memadai, agar supaya masyarakat lebih mengetahui politik hitam yang dimainkan oleh elit busuk dalam momen pemilihan kepala daerah.

#### **D. Pemilu Kepala Daerah Langsung**

Berbicara mengenai pemilu kepala daerah langsung, maka banyak pendapat yang berhubungan dengan itu. Ada yang menganggap bahwa itu adalah ruang yang paling demokratis dalam memilih pemimpin di daerah, karena semua orang berhak untuk memilih pemimpinnya. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa pemilukada langsung memiliki banyak kerugian bagi pembangunan masyarakat.

Konsep pemilukada langsung merupakan sistem yang dianggap paling demokratis karena rakyat memilih secara langsung kepala daerah sehingga legitimasi terhadap proses dan hasil pemilihan sangat besar. Sehingga masyarakat mampu dan mempunyai kekuasaan untuk mengontrol jalannya kepemimpinan dan pemerintahan. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah secara langsung diniatkan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Pertumbuhan demokrasi di tingkat lokal ini merupakan iktiar untuk menacari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representative.

Pemilukada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. pemilukada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable ).

Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya Pemilukada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat (Ahmad Nadir, 2005; 125).

Di samping itu, pemilu kepala daerah langsung, telah membuat jejaring sosial tradisional (*potuhan-ntuha*) di Wakatobi terputus, sepupu satu, dua kali terputus hanya karena beda pilihan. Pada hal itu adalah potensi sosial kita yang memiliki nilai yang tinggi. Kerja bakti dan gotong royong habis, karena semuanya dinilai dengan uang.

Di samping itu, pemilukada langsung juga adalah ruang pertautan para elit-elit politik, (pemerintah, pengusaha, lembaga dan adat) untuk melakukan relasi-relasi baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka lahirlah tawar menawar politik, yang terjadi antarelit politik (pengusaha, tokoh adat, kepala-kepala desa dan calon bupati dan wakil bupati). Jika tetap seperti ini, maka pemilukada bukannya akan menghasilkan pemimpin yang baik, tetapi justru akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter *Rent Seeking* yang bukannya bekerja membangun kesejahteraan masyarakat, tetapi justru pemimpin-pemimpin yang hanya memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompok, dan bahkan banyak mempergunakan keuangan daerah untuk kepentingan pribadi dan politiknya (Sumiman Udu, 2012: 7).

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang artinya *masalah* yang dibawa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi, dan memahami suatu situasi

sosial, peristiwa, peran, interaksi dalam kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini juga masih bersifat holistik, belum jelas, kompleks, dinamis dan penuh makna serta bersifat alamiah (Sugiyono, 2011: 9).

Tujuan yang diperoleh dari penggunaan metodologi ini adalah menemukan dan menjelaskan bagaimana peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Wakatobi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti karena memudahkan dalam mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang tidak hanya sekarang namun di masa silam juga.

## **B. Instrument Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif peneliti akan lebih banyak *menjadi instrumen*, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *key instruments* (Sugiyono, 2011; 92). Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data-data lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berfungsi sebagai instrument pendukung.

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara. Alasan mengambil lokasi tersebut adalah lokasi penelitian tempat penyusun berdomisili sehingga mampu memahami budaya dan karakter dari penduduk setempat, yang dapat membantu proses penyusunan skripsi serta keinginan peneliti untuk mengetahui lebih jelas lagi peranan elit tradisional dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2015.

## **D. Fokus penelitian**

Penelitian ini fokus di kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara serta yang nantinya akan diwawancarai peneliti adalah orang-orang (informan) yang memiliki pengalaman terhadap permasalahan yang ada. Antara lain 1. Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi (Bupati dan Wakil Bupati), 2. Tokoh Wakatobi dalam berbagai profesi (Petani, Pedagang, Birokrasi), 3. Tokoh Adat, 4. Elit tradisional Wakatobi dalam partai politik (Pengurus partai, anggota partai), 5. Elit tradisional Wakatobi di eksekutif dan legislatif tahun 2014-2019, 6. Masyarakat pemilih.

## **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data didapatkan melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literature-literatur hasil penelitian, artikel, foto-foto dan bahan statistik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2011; 224).

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yakni sebagai berikut:

### **1) Observasi**

Nasution (1988), bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Nasution dalam Sugiyono, 2011: 226).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi yang oleh Susan Stainback (1988) disebut *Participant Observation* (Observasi Partisipatif). Observasi partisipasi menurut Susan Stainback adalah "*in participan observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities*"

(Susan Stainback dalam Sugiyono, 2011: 227). Dalam observasi ini, peneliti mengamati dan terjun langsung bersama-sama dengan objek yang akan diteliti, mendengarkan apa yang dikatakan nara sumber, apa yang dikerjakan nara sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan juga jenis observasi partisipasi lengkap (*complete participation*), dimana dalam mengumpulkan data peneliti terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan oleh sumber data. Jadi suasananya juga natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian.

## 2) Wawancara

Esterberg (2002), mendefinisikan interview sebagai berikut, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2011: 231).

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang didalamnya (Sugiyono, 2011; 232).

Ada macam-macam interview/wawancara, Esterberg (2002) dalam (Esterberg dalam Sugiyono, 2011: 233) merumuskannya menjadi 3 macam wawancara :

### a. Wawancara terstruktur (*Structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

### b. Wawancara semistruktur (*Semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

### c. Wawancara tak terstruktur (*Unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara ini yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

## 3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dimana studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011; 240).

## G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri (Sugiyono, 2011; 244).

Dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2011; 245).

Analisis data terjadi disaat peneliti sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, selesai dari lapangan, dan dalam kenyataannya bahwa analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, bukan setelah selesai pengumpulan data.

1. Analisis Sebelum di Lapangan
2. Analisis Data di Lapangan
3. Analisis Selama di Lapangan



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari elit tradisional Wakatobi dalam pemilihan kepala daerah ditingkat lokal. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat di lihat dari beberapa indikator di bawah ini sebagai berikut :

#### a. Nilai yang mendasari sumber daya ekonomi elit tradisional Wakatobi

Setiap warga negara Indonesia baik itu elit tradisional Wakatobi maupun masyarakat biasa berhak untuk memiliki sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam perkembangan politik, ekonomi sebagai sarana penunjang dalam setiap kegiatan politik. Setiap kegiatan-kegiatan politik ada cost/membutuhkan adanya ekonomi.

Banyak faktor yang mendorong orang berpolitik diantaranya karena didasari oleh ekonomi yang mapan dan cukup. Ekonomi pada dasarnya kebutuhan yang urgen dalam perkembangan politik sehingga kebanyakan masyarakat terjun dalam dunia politik karena memiliki ekonomi yang cukup.

Pada umumnya elit tradisional Wakatobi untuk massa sekarang tidak memiliki nilai sumber daya ekonomi dalam berpolitik, itupun kalau ada hanya sebahagian saja yang di miliki, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi, Drs La Ode Sefu Bahwa : *"Nilai dari sumber ekonomi elit tradisional Wakatobi tidak ada, sumber ekonomi elit tradisional Wakatobi itu sama saja dengan masyarakat biasa. Dulu elit tradisional Wakatobi memiliki Tanah dan menguasai tanah yang ada dimasyarakat, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. elit tradisional Wakatobi untuk memperoleh ekonomi penuh dengan perjuangan. Dan warisan yang diberikan oleh orang tua terdahulu itu biasanya hanya sedikit saja bahkan sebahagian besar tidak ada."* (Wawancara 5 Agustus 2015)

Begitu juga yang dikatakan oleh Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Wakatobi Bapak La Ode Diale berikut kutipan wawancaranya : *"Elit tradisional Wakatobi tidak memiliki sumber daya ekonomi, elit tradisional Wakatobi hanya sebagai pelindung masyarakat, untuk konteks sekarang ini elit tradisional Wakatobi dalam memperoleh sumber daya ekonomi dengan kerja keras dan perjuangan. Warisan yang diberikan oleh orang tua ( para leluhur ) hanya sebatas rumah dan beberapa tanah yang tidak terlalu luas hanya bisa untuk mendirikan tempat tinggal dan bangunan."* (Wawancara tanggal 4 Agustus 2015)

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Dari kalangan Petani Bapak La Ode Mardala berikut kutipan wawancaranya : *"Bahwa nilai dari sumber daya ekonomi yang di miliki oleh elit tradisional Wakatobi adalah Tanah, tetapi ini hanya sebahagian kecil elit tradisional yang memiliki tanah. Elit tradisional Wakatobi menguasai tanah hanya daerah-daerah tertentu saja, itupun tanah yang dimiliki di biarkan begitu saja, tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan tidak terorganisir sehingga tanah yang dimiliki tidak mempunyai nilai tambah atau dapat mendatangkan uang."* (Wawancara Tanggal 28 Agustus 2015)

Hal serupa juga dikatakan Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi Bapak Drs.H. La Ode Bou berikut kutipan wawancaranya : *"Nilai-nilai dari sumber ekonomi yang di miliki oleh elit tradisional Wakatobi antara lain adalah Tanah dan bangunan, perkebunan jati, tabungan, perusahaan (Kontraktor), usaha dagang dan lain lain yang merupakan sumber daya ekonomi yang di miliki. Sumber daya ekonomi tersebut yang paling banyak dimiliki oleh elit tradisional Wakatobi adalah usaha dagang dan tanah. Tetapi untuk tanah hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Sumber daya ekonomi tersebut pastinya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita politik elit tradisional Wakatobi. Dengan semakin besarnya nilai dari sumber daya ekonomi yang dimiliki akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat mengingat sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mendapatkan dukungan secara politik*

*dari masyarakat. Disamping itu juga sumber daya ekonomi yang mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat karena faktor kemiskinan masyarakat Wakatobi dan moralitas.” (Wawancara tanggal 13 Agustus 2015)*

Kemudian untuk lebih menyakinkan lagi mengenai nilai sumber daya ekonomi kemudian melakukan wawancara tokoh Adat Bapak La Ode Patasia berikut kutipan wawancaranya : *”Nilai sumber daya ekonomi elit tradisional Wakatobi adalah dulunya adalah tanah, perkebunan dan pertanian. Elit tradisional Wakatobi adalah orang yang pertama mengarap/ membuka lahan pertanian, perkebunan sehingga tanahnya tersebar dimana-mana tetapi karena adanya tuntutan ekonomi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks sehingga tanah-tanah, pertanian dan perkebunan tersebut di jual kepada masyarakat lain. Sehingga untuk konteks sekarang ini tanah, yang dimiliki tinggal sedikit bahkan cuma tanah untuk tempat tinggal.” (Wawancara tanggal 4 Agustus 2015)*

Sumber daya tersebut merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya tersebut merupakan masukan yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia.

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari sumber ekonomi elit tradisional Wakatobi itu adalah tanah, perkebunan dan lain sebagainya. Tetapi karena perkembangan jaman dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks sehingga tanah-tanah tersebut banyak yang dijual kepada masyarakat lain. Sumber daya tanah yang dimiliki elit tradisional itu di jual pada dasarnya karena tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Untuk zaman sekarang ini, nilai sumber daya ekonomi tanah, pertanian, perkebunan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja yang mempunyai modal ekonomi yang cukup dan itupun hanya berjumlah sedikit.

Berdasarkan pengamatan peneliti, elit tradisional Wakatobi menguasai sumber ekonomi pada zaman dulunya, menguasai tanah, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tetapi untuk konteks sekarang ini karena zaman sudah semakin maju dan sudah terkikis dengan gelombang demokrasi, sehingga sumber ekonomi tersebut tinggal sebahagian saja yang dimiliki, itupun hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki.

#### **b. Peranan elit lokal dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Wakatobi**

Sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengambil bagian didalam pemerintahan, secara langsung atau lewat wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas atau hak dalam berpolitik. Hak warga negara dalam tradisi liberal maupun HAM adalah *Pertama*, hak sosial, dimana warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan bentuk-bentuk kesejahteraan yang disediakan oleh negara. *Kedua*, hak sipil, yaitu hak untuk merdeka dari rasa takut akibat penyalahgunaan kekuasaan dan gangguan pihak lain, seperti hak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang wajar, hak milik, dan kemerdekaan berserikat dan berpendapat. *Ketiga*, hak berpolitik, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, dimana warga negara berhak memilih atau dipilih. Inilah yang mendasari elit tradisional Wakatobi sebagai warga negara mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya dengan terlibat dalam pengambilan keputusan publik, baik melalui pemerintah maupun parlemen.

Keterlibatan elit tradisional Wakatobi dalam politik adalah suatu hal yang wajar dan merupakan perwujudan hak politik dan hak sipilnya. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Wakatobi Bapak Ir. Hugua adalah : *”Elit tradisional Wakatobi terlibat dalam berpolitik karena ingin memberikan pembelajaran tentang arti demokrasi dalam berpolitik, sehingga masyarakat itu di harapkan mengikuti suatu kegiatan politik bukan sekedar menjadi masyarakat acuh-tak acuh tetapi memahami benar apa tujuan dan mamfaat gerakan politik itu sendiri. Dan banyak cara dalam memperoleh dukungan dalam masyarakat misalnya dengan melakukan pendekatan kekeluargaan serta karismatik ketokohan dan ekonomi”.* (Wawancara tanggal 14 Agustus 2015)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Drs H Ali Thalib MPd adalah sebagai berikut : *"Elit tradisional Wakatobi berpolitik karena adanya faktor kultur artinya kultur di Wakatobi yang menjadikan pemimpin di Wakatobi itu adalah berasal dari elit tradisional Wakatobi. Dan faktor pendidikan bahwa elit tradisional masih mendominasi pendidikan di kabupaten Wakatobi sehingga memiliki kemampuan dalam memimpin. Hal ini dapat di buktikan dengan menginventarisasi pejabat-pejabat di Wakatobi yang sebahagian besar berasal dari elit tradisional Wakatobi dan masyarakat Wakatobi seakan-akan kepemimpinan itu tidak mau di berikan kalau bukan elit tradisional"*. (wawancara tanggal 28 Agustus 2015)

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Wakatobi Bapak Diale, berikut kutipan wawancaranya : *"Elit tradisional Wakatobi berpolitik karena adanya naluri politik, bahwa elit tradisional Wakatobi di lahirkan untuk menjadi pemimpin, disamping itu juga ingin menyumbangkan dirinya kepada daerah Wakatobi lewat jalur politik. Dan banyak daerah-daerah yang pemimpinnya berasal dari elit tradisional Wakatobi, hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa elit tradisional Wakatobi memiliki karismatik dan modal sosial masyarakat sehingga terpenggil dalam berpolitik"*. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2015)

Tetapi berbeda halnya dengan yang di ungkapkan Bapak Mustamin, (masyarakat pemilih) berikut adalah hasil wawancaranya : *"Elit tradisional Wakatobi ikut terlibat dalam politik tidak lepas mencari kepentingan individu, mencari kekuasaan, mencari kekayaan, jabatan dan materi. Dan dalam mencari dukungan suara tidak perna lepas dari money politik dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh dukungan misalnya dengan memberikan janji- janji dan lain sebagainya"*. (Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2015)

Dari beberapa wawancara di diatas penulis menyimpulkan bahwa elit tradisional Wakatobi terlibat dalam politik karena adanya panggilan sejarah, adanya naluri politik, adanya panggilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Elit tradisional Wakatobi sudah memiliki modal sosial dalam masyarakat sehingga dengan mudah dalam berpolitik.

Elit tradisional Wakatobi dalam memperoleh dukungan politik pada umumnya dengan melakukan mendekati kekeluargaan (pendekatan persuasif), pertemanan, dan dengan melakukan komunikasi politik secara kontinyu. Dengan pendekatan kekeluargaan merupakan cara yang paling jitu dan memberikan andil suara yang cukup. Di samping itu juga dengan jalur kekeluargaan dapat membangun ikatan emosional. Yang kedua adalah dengan melakukan komunikasi politik, bahwasanya komunikasi politik dilakukan dengan mengadakan pertemuan pertemuan baik pertemuan dikalangan keluarga, maupun dengan masyarakat umum dengan memaparkan visi misi dan memberikan janji-janji ketika akan sudah menjadi dewan.

Pada dasarnya kriteria masyarakat memperoleh dukungan politik dalam pemilu legislatif idealnya adalah harus memenuhi syarat kapabilitas (kemampuan pribadi), akseptabilitas (dapat diterima masyarakat), akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan kinerjanya), dan marketable ( harus layak jual/ dapat di terima masyarakat). Disamping itu juga harus aspiratif atau bisa menyerap aspirasi masyarakat. Begitu terpilih menjadi anggota dewan, seseorang harus bisa melepas baju partai politiknya sehingga bisa lebih aspiratif dan bekerja secara maksimal untuk menyerap aspirasi rakyat.

Kehidupan warga negara akan berhubungan erat dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menjalankan hak dan kewajiban tersebut sudah merupakan bagian dari kegiatan politik. Dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memberi pelajaran berpolitik yang benar kepada masyarakat, sehingga pandangan politik yang begitu mulia tidak disalah artikan untuk kepentingan yang tidak baik. Pemahaman terhadap aktivitas politik sesungguhnya dapat membantu dalam memahami maksud apakah yang menjadi dasar pergerakan politik, dan membantu kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan sekarang dengan memberikan dasar-dasar penyelesaian disesuaikan dengan kebutuhan dan masa sekarang.

## **B. Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda terlihat bahwa dinamika politik lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Wakatobi tidak akan terlepas dari beberapa faktor, yaitu:

### **1) Proses demokratisasi dan perkembangan civil society di tingkat lokal.**

Menurut peneliti beberapa pemilukada pasca reformasi, telah terlihat bahwa demokratisasi di Wakatobi masih banyak dinodai, tekanan dan intimidasi oleh aktor-aktor politik kita yang tidak bertanggung jawab, politik uang dan penyelewengan lainnya masih saja kita jumpai, terlebih pada pilkada 2009 dan pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu, masih terlihat banyaknya penodaan demokrasi. Oleh karena itu, pembangunan demokratisasi di Wakatobi masih perlu dipertanyakan dan ini membutuhkan kesadaran politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik.

### **2) Paradigma baru otonomi daerah.**

Untuk melihat dinamika politik lokal, diperlukan paradigma baru terhadap otonomi daerah. Karena tanpa kita membenahi paradigma otonomi daerah, maka politik lokal kita akan tetap terjebak pada desentralisasi kekuasaan dari elit politik pusat ke tingkat elit politik lokal. Di sini, politik lokal akan banyak dipengaruhi oleh kontrak-kontrak politik atau istilahnya Yusuf Solihan sebagai katrelisasi politik di tingkat lokal. Akhirnya para elit politik lokal hanya berpikir untuk memperkaya diri dan melupakan tanggung jawabnya dalam mengemban amanat rakyat. Di sini perlunya merumuskan paradigma baru otonomi daerah sesuai dengan konteks hubungan pusat dan daerah.

### **3) Model resolusi konflik di tingkat lokal secara damai.**

Belajar dari berbagai hasil pilkada di berbagai daerah, termasuk Wakatobi tahun 2004, konflik lokal merupakan potensi yang sangat berbahaya jika dibiarkan. Untuk itu, pemikiran untuk meminimalisir atau resolusi konflik harus dipikirkan dengan baik. Sebab tidak menutup kemungkinan dinamika politik lokal kita akan berdampak pada terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat bawah. Untuk itu, diperlukan kesadaran bagi aktor-aktor politik untuk memahami dan meminimalisir isu-isu sara yang dapat menciptakan konflik terbuka di dalam masyarakat.

Melihat realitas dalam sejarah Buton, *kamboru-mboru tolupalena* tidak dapat melakukan rekonsiliasi konflik elit politik Buton, sehingga Buton tidak dapat bangkit sebagai sebuah tatanan yang baik sebagaimana di masa lalu. Dan ini jika tidak diantisipasi oleh, elit-elit politik yang ada di Wakatobi, maka tidak menutup kemungkinan Wakatobi akan gagal mencegah terjadinya konflik di dalam dinamika politik kita. Oleh karena itu, meminimalisir dan rekonsiliasi konflik dalam membangun dinamika politik lokal di Wakatobi harus menjadi tanggung jawab aktor-aktor politik dan terutama partai politik. Karena jika terjadi konflik terbuka, maka Wakatobi akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan tujuan pembangunan Wakatobi sangat susah untuk dicapai.

Dengan demikian, aktor-aktor politik (pemerintah dan partai politik, elit ekonomi) sebaiknya sudah saatnya untuk mempelajari pola dan kecenderungan konflik yang akan terjadi di dalam masyarakat Wakatobi. Karena dengan menemukan pola dan kecenderungan konflik tersebut akan memudahkan kita untuk menemukan pola resolusinya di masa yang akan datang. Misalnya saja istilah *labu wana labu rope* yang menjadi strategi Buton dalam menyelesaikan politik eksternalnya di masa lalu. Itu diambil karena Buton mengenal pola dan kecenderungan serangan yang mengikuti musim angin.

Mengacu pada faktor-faktor yang terjadi diatas, maka beberapa pertanyaan yang harus dijawab adalah:

#### **a) Kelembagaan dan hubungan antara lembaga politik di tingkat lokal.**

Perkembangan dinamika politik kita juga akan banyak ditentukan oleh faktor kelembagaan di dalam masyarakat Wakatobi, misalnya lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta, agama, adat, dan kelompok-kelompok profesional, pengusaha, akademisi, wartawan, mahasiswa dan lain-lainnya. Jika lembaga-lembaga tersebut bekerja dengan maksimal, atau dapat berjalan dengan semestinya, maka kemudian yang perlu lagi dipertanyakan adalah bagaimana gubungan antarlembaga tersebut dalam pembangunan dinamika politik di Wakatobi? Kita khawatir ada fungsi-fungsi kelembagaan yang tidak berjalan dengan sebenarnya, misalnya saja legislatif dan eksekutif, legislatif dan yudikatif, eksekutif dengan yudikatif. Karena jika hubungan lembaga-lembaga ini tidak berjalan dengan semestinya, maka dinamika politik lokal di daerah ini akan tersendat-sendat, dan dapat sangat berbahaya karena akan terjadi kong kali kong antarlembaga, sehingga akan terjadi banyak hal yang merugikan masyarakat.

**b) Perkembangan kelompok marjinal di tingkat lokal.**

Pentingnya dalam melihat dinamika politik lokal adalah perkembangan kelompok marjinal di tingkat lokal. Dalam hubungannya dengan Wakatobi, apakah kelompok-kelompok marjinal di tingkat lokal sudah dilibatkan dalam ruang dinamika politik atau belum. Apakah suara mereka sudah masuk dalam agenda pengambilan kebijakan, apakah hak-hak mereka sudah diperhatikan. Jika kelompok-kelompok marjinal dalam suatu kawasan belum tersentuh (hak-hak politik mereka) dalam dinamika politik Wakatobi, maka akan terlihat bagaimana dinamika politik lokal kita telah gagal.

Beberapa daerah termasuk di Wakatobi, kasus pemilu kepada daerah langsung telah melahirkan kondisi sosial politik yang tidak menguntungkan untuk pembangunan Wakatobi, baik bagi pemerintah Wakatobi terlebih bagi masyarakat kebanyakan. Bagi pemenang pemilu kepala daerah langsung di Wakatobi, kepemimpinan pasca pemilukada seakan disandra oleh para tim sukses yang merasa berjasa dan berhak untuk melakukan maneuver atau dendam politik untuk menyengsarakan masyarakat terutama yang tidak sehaluan politik dengan mereka. Beberapa contoh kemudian, guru-guru digoyang dengan dilakukannya rencana roling tempat kerja, yang dilakukan dengan alasan penyegaran, tetapi dikedalaman niatan itu adalah motiv dendam dan sakit hati, akibatnya muncul 400 orang lebih PNS yang akan di pindahkan dari tim sukses.

Persekutuan atau persengkokolan antarelit di dalam pilkada langsung juga akan berdampak pada adanya kong kali kong dalam pembangunan daerah, baik antarlembaga maupun antarpribadi yang merasa berjasa dalam proses pilkada. Contoh kasus, penerimaan CPNS di Kabupaten Muna, berebut hanya karena adanya orang yang merasa berjasa dan jadi tim Bupati terpilih, dan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi di Wakatobi di masa depan.

Jika ini tidak disadari oleh pihak pemenang pemilukada, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah kabupaten Wakatobi akan membawa perahu Wakatobi berada dalam pelayaran yang tersandra oleh tim suksesnya sendiri. Apa artinya ini, tentunya pemerintahan akan mengalami ketidakpercayaan masyarakat, karena mereka tidak mampu membebaskan diri dari pengaruh pemilukada yang beberapa bulan telah berlalu.

Yang menjadi persoalan adalah, mungkinkan pilot Wakatobi bisa bebas membawa perahu yang bernama Wakatobi ini kepada suatu tatanan yang dapat mensejahterakan masyarakat Wakatobi? Ataukah para Juragan ini hanya akan menorehkan tinta hitam dalam sejarah Wakatobi? yang jelas anak-anak Wakatobi akan menulis sejarahnya sendiri, bahwa pada tahun tahun pertama perjalanan Wakatobi sebagai sebuah kabupaten pernah lahir sebuah kepemimpinan yang tersandra oleh kepentingan kartel, tim sukses, yang membawanya kepada perwujudan hawa nafsu dan kepentingan kelompok dan bukan pada kepentingan masyarakat Wakatobi secara umum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan, skripsi yang berjudul “Peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara”. Maka kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam bidang ekonomi, adanya hubungan ketergantungan antara masyarakat (massa) dengan elit tradisional Wakatobi. Dengan modal ekonomi tersebut mampu menimbulkan hubungan sangat permanen antara keduanya, yang mana dengan keelit tradisional tersebut orientasi politik tidak akan berpaling kepada siapapun. Dalam bidang politik, pilihan politik elit tradisional Wakatobi di tempatkan sebagai tokoh, dimana keputusan politik akan selalu di patuhi dan tidak berani dilanggar. Di bidang sosial, posisi sosial (kedudukan) akan berpengaruh kepada masyarakat, dimana dengan struktur itu masyarakat akan merasa aman dalam lingkungan bermasyarakat dan elit tradisional Wakatobi akan memelihara adat dan nilai tersebut.
- 2) Dengan berbagai macam peran yang disandangnya, elit tradisional Wakatobi dalam memperoleh dukungan suara ini tidak hanya sekedar mengandalkan status sosialnya, tetapi juga memiliki kemampuan intelektualitas, kecerdasan, pengalaman, dan keterampilan serta bersikap ramah dalam setiap penampilan di tengah-tengah masyarakatnya, tetapi ada juga yang dalam mencari dukungan suara strategi yang di tempuh adalah dengan menggunakan money politik.
- 3) Pengaruh ketokohan dalam pemilu legislatif dikabupaten Wakatobi masih sangat dominan, kekuatan partai dalam memperoleh dukungan suara sangat kecil sekali. Untuk memperoleh dukungan yang besar dari masyarakat kekuatan ketokohan menjadi salah satu daya tarik dalam pemilu legislatif. Figur memang pada dasarnya menjadi salah satu ciri dari politik lokal yang terjadi di Kabupaten Wakatobi.
- 4) Untuk meningkatkan dinamika politik lokal diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu :
  - a) Proses demokratisasi dan perkembangan civil society di tingkat lokal.
  - b) Membangun paradigma baru otonomi daerah, dan
  - c) Model resolusi konflik di tingkat lokal secara damai.

### **Saran**

Setelah kita mengambil sebuah kesimpulan dari penelitian ini maka saran penulis dalam dinamika politik lokal tentang peranan elit tradisional adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam mencari dukungan masyarakat, calon legislatif itu biasanya menghalalkan segala hal, terutama dengan menggunakan politik uang (money politik), untuk itu kita harus memperketat regulasi-regulasi agar dalam berpolitik sehat dan tidak ada kecurangan serta etika berpolitik itu tetap ada.
- 2) Bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, terutama pemilih tradisional agar dalam memilih calon legislatif harus secara rasional artinya calon yang dipilih harus betul-betul calon/ kandidat yang berkualitas, kapabilitas, dan bertanggung jawab sehingga bisa memimpin dimasyarakat dan tidak membodohi masyarakat.

Di zaman reformasi sekarang ini, persepsi masyarakat untuk membeda-bedakan elit tradisional (bangsawan) dan bukan elit tradisional dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik itu perlu dihilangkan, untuk itu tidak ada yang jurang pemisah antara elit tradisional dengan bukan elit tradisional, dan perlu adanya kesetaraan dalam masyarakat. Seseorang dihormati bukan kerana kekuasaannya tetapi karena sikap dan perilakunya mencerminkan pola keteladanan dan panutan dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, 2003, “*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*”, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ahmad Nadir, 2005 “*Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*”. Gresik, Averros Press.
- Bruce J Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992)
- Giddens, Anthony. 2002. *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: PT Gramedia
- Giroth, Lexie. M, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja*, STPDN Press, Jatinangor.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuskridho Ambardi, 2009. *Mengungkap Politik Kartel: studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi*, KPG (keputusan populer Gramedia), Jakarta.
- Mas’oed, Mohtar. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Ndraha, Taqliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurhasim, Moch.,2003.,”*Konflik Antar Elit Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah : Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*”. Jakarta, Pusat Penelitian Politik- LIPI.
- Sugiyono, 2011: *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soelaiman Joesoef, *Materi Pokok Dinamika Kelompok, 1986*, Penerbit Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT. Rajawali
- Sumiman Udu, 2012. *Pertautan Kepentingan Antarelit* (Disampaikan dalam seminar Regional dan Musyawarah Daerah Se-Sultra Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia di Aula Hotel Wakatobi).

### **Sumber-sumber lain :**

UU No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*  
Wikipedia.com